

# Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Tepi Jalan Oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Zilfi Purnama Rahmi<sup>1</sup> Dia Meirina Suri<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
zilfipurnamarahmi@student.uir.ac.id diameirinasuri@soc.uir.ac.id

Received : April 23, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

## Abstract

*This research aims to determine the implementation of roadside parking supervision by the Pekanbaru City Transportation Service Parking UPTD (Case Study, Pekanbaru City District) and to determine the inhibiting factors. The research method used is a qualitative method. The theory used is George R. Teery's theory with the indicators set, namely setting standards, determining monitoring activities, making comparisons with activity implementers, and making corrections. The results of research on the Implementation of Roadside Parking Supervision by the Pekanbaru City Transportation Service Parking UPTD (Case Study of Pekanbaru City District) show that the results have not been fully implemented optimally. This is because the duties of the Pekanbaru City Transportation Service Parking UPTD have not been running optimally. This can be proven firstly that there are still unofficial parking attendants, which can be seen by not giving tickets when someone parks a vehicle and there are still parking attendants who do not wear full attributes. Second, there are still vehicles parked in places where parking is not permitted. However, in terms of planning and organization, it has gone well. However, there are still inhibiting factors in the Implementation of Roadside Parking Supervision by the Pekanbaru City Transportation Service Parking UPTD (Case Study of Pekanbaru City District), namely human resources who are less assertive, responsive and effective in solving problems in the field.*

**Key Words :** *Supervision, Roadside Parking, Pekanbaru City Distric*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Tepi Jalan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori George R. Teery dengan indikator yang ditetapkan yakni menetapkan standar, menetapkan kegiatan pengawasan, mengadakan perbandingan terhadap pelaksana kegiatan, dan mengadakan koreksi. Hasil penelitian Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Tepi Jalan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) menunjukkan hasil belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Hal ini karena tugas UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, ini dapat dibuktikan pertama masih adanya juru parkir yang tidak resmi dapat dilihat dengan tidak memberikan karcis disaat ada yang memarkirkan kendaraan beserta masih adanya juru parkir yang tidak memakai atribut secara lengkap. Kedua, masih adanya kendaraan yang parkir di tempat yang tidak di perbolehkan untuk parkir Namun dari segi perencanaan dan pengorganisasian sudah berjalan dengan baik.

**Key Words :** *Pengawasan, Parkir Di Tepi Jalan, Kecamatan Pekanbaru Kota*

## Pendahuluan

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, dan juga merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan pembangunan yang begitu pesat di Pulau Sumatera, salah satunya di bidang transportasi darat, terkhusus kendaraan bermotor. Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Meropolis di mulai dengan ditetapkan Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah Kota Pekanbaru sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu : “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa..

Untuk mewujudkan Visi Kota Pekanbaru ini, Kota Pekanbaru terus berbenah dan terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun, dimana perkembangan ini meliputi perkembangan penduduk, sektor ekonomi, sosial, transportasi dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Dengan penambahan penduduk Kota Pekanbaru berdampak pada pertumbuhan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas dan kebutuhannya. Tetapi semakin banyak jumlah kendaraan bermotor semakin banyak pula jumlah pemakai kendaraan bermotor ini yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Kota metropolitan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru tidak luput dari imbasnya banyaknya kendaraan di Pekanbaru yang berjalan seiringan dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan adalah salah satu persoalan-persoalan fenomena kota yang sering terjadi karena pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan sangat pesat.

Banyaknya gedung yang dibangun seperti tempat perbelanjaan, tempat makan, serta toko-toko yang masih belum memiliki tempat parkir untuk pelanggannya, sehingga badan jalan pun digunakan sebagai alternatif tempat parkir yang pada akhirnya memicu kemacetan lalu lintas. Perparkiran menjadi fenomena yang sering di jumpai dalam sistem transportasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat (32) parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Maka, parkir adalah memanggalkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya di tentukan oleh dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dalam koordinir menunjuk juru parkir di tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Koordinator Parkir dan Juru Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota

Jumlah Koordinator	12 orang
--------------------	----------

Jumlah Juru Parkir/Pungut	30 orang
Jumlah Titik/Lokasi Parkir	10 titik

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023*

Kota Pekanbaru mempunyai instansi untuk memungut retribusi parkir yang mana instansi pemerintah tersebut adalah Dinas Perhubungan yaitu bagian UPTD Perparkiran, dimana objek yang diawasi oleh UPTD Parkir tersebut meliputi sarana dan prasarana perparkiran, coordinator parkir, juru parkir, dan lokasi perparkiran. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung perkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu parkir di jalan (on street parking) dan parkir di luar jalan (off street parking).

Parkir di jalan (on street parking) adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi bafan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Sedangkan parkir di luar jalan (off street parking) merupakan parkir yang dikelola secara professional oleh pengelola sehingga tidak mengganggu lalu lintas.

Parkir on street ini biasanya terjadi di deretan ruko yang memiliki halaman sempit, sehingga pengunjung atau konsumennya memarkir kendaraannya di bahu jalan, atau juga bisa terjadi karena ada kegiatan masyarakat dengan lahan parkir yang terbatas. Karena sifatnya menggunakan badan jalan sebagai tempat parkirnya, terdapat beberapa oknum yang memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan marka jalan yang telah ditetapkan yang dimana di sebut dengan parkir liar.

Pengawasan parkir di tepi jalan kecamatan Pekanbaru Kota, terutama di depan Ramayana STC, RSUD, dan di kawasan Mall Pekanbaru sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengawasan parkir di tepi jalan, seperti kurangnya pengawas dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus memperhatikan masalah ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah parkir liar. Ini bisa melalui peningkatan sarana dan prasarana parkir, serta memperbanyak pengawas parkir yang bertugas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambil memenuhi regulasi yang ada dan tidak merugikan pengendara dan masyarakat.

Dengan pengawasan parkir di tepi jalan yang baik dan tepat, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah parkir liar dan memperlancar lalu lintas di jalan, sehingga pengendara dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Dalam menjalankan perannya, fasilitas yang baik terhadap Dinas Perhubungan juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar suatu penyelenggara serta suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik dan untuk menghindari hal ataupun pihak hal yang dapat merugikan baik dari pihak Dinas Perhubungan lainnya, Dinas

Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman, dalam konteks ini Dinas Perhubungan dalam pengaturan sistem perparkiran dimana daerah Pekanbaru masih ada yang beroperasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluasi) parkir ilegal harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasarana yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, dan akan optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijakannya. Disamping pengawasan kebijakan Dinas Perhubungan juga diuntut mengawasi sarana dan prasarana di lapangan dalam hal ini sarana dan prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat. UPTD Perparkiran terus melakukan patroli rutin untuk menertibkan parkir liar disejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru, kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Pekanbaru, Radinal mengatakan penertiban parkir liar itu di lakukan untuk mengantisipasi gangguan arus lalu lintas sekaligus menertibkan kendaraan sesuai dengan marka jalan yang seharusnya tidak dibolehkan untuk Parkir.

UPTD Perparkiran terus melakukan penertiban parkir liar namun terdapat masih banyak kendaraan di sepanjang jalan yang ada rambu di larang parkir, kemudian ada juru parkir yang membuka lahan parkir di atas jalan tersebut, pihaknya melakukan pembubaran parkir liar tersebut, dan mengarahkan pemilik kendaraan untuk parkir di lokasi resmi yang telah disediakan.

Diharapkan kepada masyarakat tentunya agar lebih memahami tentang aturan yang berlaku apabila ada rambu-rambu di larang parkir itu artinya kendaraan tidak boleh parkir di tempat tersebut, UPTD Perparkiran terus melakukan patroli rutin agar praktek parkir liar itu tidak terjadi lagi.

Pertisipasi masyarakat atau pengguna jasa parkir merupakan salah satu faktor penting yang menentukan suatu keberhasilan. Partisipasi masyarakat yang di maksudkan di sini adalah peran serta secara aktif dalam mendukung pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bentuk partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan sosialisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait rambu-rambu pada kawasan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas fenomena yang dapat kita simpulkan yaitu, antara lain :

1. Banyaknya petugas tidak resmi, seperti tidak dilengkapi atribut yang lengkap, seperti (baju rompi, memakai sepatu, memiliki KTA dan mempunyai karcis).
2. Banyak kendaraan yang berparkir di tepi jalan secara liar, khususnya (di depan Ramayana STC, RSUD dan Mall Pekanbaru) sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan tersebut.
3. Terdapat kesemrautan dalam kegiatan parkir seperti saat ditemukannya dilapangan kendaraan tidak tertata dengan rapi serta tidak teratur.

### **Tinjauan Pustaka**

Administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penuh gerakkan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian

tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi usaha. Sedangkan administrasi publik ialah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena di dalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok di dalam pemerintahan.

Organisasi merupakan suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Orang tidak pernah melihat atau menyentuh wujud organisasi secara nyata. Tetapi, umumnya mereka hanya bisa merasakan dari hasil-hasil yang ditimbulkan baik dalam bentuk produk atau jasa. Dengan demikian, sebuah organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai tujuan.

Manajemen sebagai ilmu adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Sedangkan manajemen sebagai seni yaitu dipandang sebagai keahlian, kemahiram, kemampuan, serta keterampilan, dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Istilah mengenai pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata "awas" dimana berarti pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktivitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah di gariskan dan di perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawapengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono 2002:81).

George R. Teery (dalam Zulkifli 2013;209) pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Sedangkan indikator pengawasan yang akan di pergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar merupakan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai untuk mencapai standar, sebagaimana yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apakah perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

- b. Menetapkan kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar).
- c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksana kegiatan merupakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.
- d. Mengadakan koreksi, Tindakan koreksi ini di maksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono,2002:153) Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu syistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang di terima (fattah, 2004:102).

Menurut Budiyanto (2016), parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan berhenti untuk beberapa saat dimana pengemudinya meninggalkan kendaraannya, sedangkan berhenti adalah keadaan kendaraan berhenti untuk beberapa saat dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Dalam berparkir pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tak mengganggu pengguna kendaraan lainnya

(Zakharenko, 2016) Model permintaan parkir, yang berkembang dari waktu ke waktu. Model ini memiliki batas permintaan taman yang luas (untuk parkir) dan intensif (berapa lama untuk memarkir), memungkinkan heterogenitas multidimensional parkir, dan evolusi permintaan sepanjang hari.

Saya menunjukkan bahwa harga optimal untuk parkir sebanding dengan tingkat kedatangan parker baru dan berbanding terbalik dengan kuadrat tingkat hunian, yang berbeda dari metode penentuan harga yang telah dibahas sebelumnya. tujuan utama penetapan harga adalah mengatur keberangkatan, bukan pendatang, sertainformasi asimetris tentang karakteristik parkir tidak mencegah otoritas parkir mencapai optimal secara sosial. Contoh numerik membandingkan kebijakan optimal dengan alternatifnya.

Parkir di tepi jalan memiliki kerugian seperti mengganggu lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Sedangkan keuntungannya yaitu murah tanpa investasi dan bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah. Posisi pada tepi jalan yaitu terdiri dari sejajar dengan sumbu jala, tegak lurus dengan sumbu jalan, dan

## **Metode**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam Pasalong, yaitu satu model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya.

Penelitian ini penulis lakukan pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta di tempat Ramayana STC,RSUD Arifin Achmad dan kawasan Mall Pekanbaru. Dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit yang mengawasi parker di tepi jalan karena dari permasalahan yang ada diketahui masih ada daerah atau wilayah yang di gunakan untuk parkir di tepi jalan. Adapun key informan

dan informan pendukung dalam penelitian ini. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar terlibat dan mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Tepi Jalan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota), dengan Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada pembahasan dalam bab ini, di uraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Tepi Jalan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota). Peneliti mendapatkan data berupa Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa Narasumber yaitu Key Informan dan Informan. Adapun KeyInforman yakni Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Informan dalam penelitian ini yakni Anggota Bagian Administrasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 5 orang Juru Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, serta 5 orang Pengguna Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota dianggap menjadi data primer, dandata sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasidari Kantor UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru, Ramayana STC, RSUD Arifin Achmad, Pasar Arengka, berupa data, struktur organisasi, rencana strategis, dan lainnya.

George R. Teery (dalam Zulkifli 2013;209) Indikator pengawasan yang akan di pergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar
2. Menetapkan Kegiatan Pengawasan
3. Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksana Kegiatan
4. Koreksi

#### **Menetapkan Standar**

Diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai apakah UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru telah melaksanakan sosialisasi terhadap juru parkir maupun masyarakat. Serta jika sosialisasi telah dilakukan terdapat pelanggaran, peringatan apa yang dilakukan oleh pihak UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa sudah terealisasikan. Namun terdapat toleransi pribadi yang mengakibatkan juru parkir maupun masyarakat tidak jera terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwapada penetapan standar yang sudah UPTD Perparkiran buat atau rencanakan sudah cukup baik, seperti menyusun rencana kedepan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dibidang retribusi parkir seperti melakukan patroli dari jam 06.00-22.00 agar para juru parkir melakukan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir. Dan juga UPTD Perparkiran terlebih dahulu menetapkan besaran target tarif retribusi parkir di Kota Pekanbaru sehingga dapat di pantau apakah tiap tahunnya penerimaan retribusi parkir mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **Menetapkan Kegiatan Pengawasan**

Diketahui dari hasil wawancara dengan Juru Parkir mengenai apakah pernah melihat petugas UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan pengawasan atau patrol di sepanjang tempat parkir di tepi jalan Kota Pekanbaru dan apakah pengawasan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bisa dilihat kurang terlaksana, dimana masih terdapat pengguna parkir yang tidak mengetahui UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru. Seharusnya masyarakat harus tau mengenai UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru ini, dimana UPTD tersebut yang akan membantu masyarakat mengenai perparkiran ini. Dan sebaiknya pihak UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan aturan dan tanggung jawabnya untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwadari segi menetapkan kegiatan, struktur organisasi kepengurusan UPTD Perparkiran sudah terstruktur, hanya saja dari pihak pengelola dalam menertibkan parkir tidak resmi UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru masih kurang maksimal dalam memberikan efek jera kepada juru parkir tidak resmi dalam hal ini UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru hanya melakukan peringatan ataupun penangkapan tanpa memberikan denda ataupun sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada juru parkir tidak resmi yang terdapat di Ramayana STC, RSUD Arifin Achmad, beserta di kawasan Mall Pekanbaru.

## **Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksana Kegiatan**

Diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengenai pengelolaan parkir, apakah atasan langsung bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru agar pengawasan penertiban parkir di tepi jalan bisa berjalan secara efektif dapat kita lihat dari kesimpulan yang di paparkan oleh Kepala UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru dalam mengupayakan pengawasan UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru semakin maju kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa walaupun UPTD Perparkiran melakukan pengawasan di lapangan selama 16 jam, namun yang terlihat dilapangan UPTD Perparkiran hanya melakukan patroli razia dilapangan dalam jangka waktu tertentu yang di bentuk secara langsung dilapangan dengan hanya memakai kendaraan pribadi sehingga terkadang mereka hanya berjalan untuk mengamati saja dan kebanyakan di lapangan para petugas sering melakukan toleransi pribadi sehingga sampai sekarang masih banyak di temui juru parkir tidak resmi dan pengguna parkir yang memarkirkan kendarandaraan yang sudah dilarang untuk parkir yang ada di tepi jalan umum.

## **Koreksi**

Diketahui dari hasil wawancara dengan juru parkir mengenai bagaimana bentuk keamanan perparkiran di tepi jalan dan bagaimana bentuk saran untuk kenyamanan parkir di tepi jalan, bisa dilihat masyarakat mengharapkan parkir di tepi jalan ini bisa aman dan nyaman. Sehingga pengawasan dari UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru dapat dikatakan berhasil

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini bukan lagi mencari solusi untuk memanjakan pihak yang salah dan melanggar Peraturan Daerah, jika mereka telah melanggar aturan, maka sudah seharusnya mereka yang ditindak dan diberikan sanksi, karena tindakan yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi beserta masyarakat di Kota Pekanbaru yang telah menata dan memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak diperbolehkan untuk parkir ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Tepi Jalan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)**

1. Hambatan yang berasal dari petugas atau disebut juru parkir itu sendiri. Dalam pelaksanaannya kegiatan perparkiran masih banyak petugas parkir yang belum sepenuhnya menggunakan karcis sebagaimana mestinya.
2. Hambatan kurang minimnya lokasi parkir. Kebanyakan lokasi parkir berada di tepi jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas dan sulit dalam pengawasan untuk proses pemungutan retribusinya.
3. Hambatan yang ada pada masyarakat pemakai jasa, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang untuk parkir.
4. Hambatan yang ada Juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan terhadap tarif perparkiran tindakan tersebut tidak menimbulkan efek jera sehingga kesalahan yang dilakukan terus di ulang kembali.
5. Hambatan pada sarana dan prasaranan yang disediakan belum tercukupi seperti rompi yang merupakan atribut yang perlu ada sehingga ada pembeda antara yang resmi dan tidak resmi.
6. Selanjutnya tidak pedulian masyarakat terhadap kesalahan-kesalahan dilapangan yang dilakukan oleh juru parkir dalam mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dari Menetapkan Standar, Menetapkan Kegiatan Pengawasan, Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksana Kegiatan, Koreksi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar, diketahui dalam melakukan urusan perparkiran ini di lakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga kegiatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga kegiatan ini dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat dijalankan sesuai dengan penetapan tersebut. Walaupun ada penetapan peraturannya namun masih ada beberapa indikator dan juru parkir yang tidak menjalankan urusan perparkiran ini dengan baik dan benar.
2. Menetapkan Kegiatan Pengawasan, diketahui dalam melakukan pengawasan parkir dibutuhkan rencana waktu untuk mengawasi, hal ini bertujuan mengoreksi kegiatan yang dilakukan oleh juru parkir dan masyarakat, apakah sesuai dengan prosedur yang

ada di lapangan atau tidak. Dimana UPTD Perparkiran dengan adanya divisi/jabatan regu pengawas terjun langsung kelapangan tanpa sepengetahuan juru parkir.

3. Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksana Kegiatan, diketahui yaitu staff pegawai dalam melakukan pekerjaan dituntut membuat laporan baik tertulis maupun lisan sebagai bahan perbandingan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga sudah menjadi kewajiban bagi para staff pegawai yang dituntut membuat laporan sesuai dengan pekerjaan yang ditangani, selain bertujuan untuk sebagai laporan pekerjaan, laporan tersebut juga bertujuan agar perkembangan perparkiran juga diketahui dengan baik.
4. Koreksi, diketahui bahwa dalam mengawasi dan menyelenggarakan perparkiran ada dijumpai permasalahan serta penyimpangan terjadi. Apabila terjadi penyimpangan maka dengan segera staff pegawai harus menyelesaikan masalah yang terjadi agar masalah perparkiran dapat diselesaikan dengan baik sehingga parkir menjadi lancar kembali. Masalah parkir ini menjadi perhatian utama yang harus diperbaiki karena menyangkut kenyamanan masyarakat dalam parkir dan menjadi tolak ukur minat masyarakat untuk berkunjung ketempat atau pusat perbelanjaan yang memiliki tempat parkir yang nyaman dan aman di Kecamatan Pekanbaru Kota

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal:**

- Maksudi, B.I. (2018). *Dasar-Dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pasalong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andry, Yussa. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli, Nurmasari. (2015). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli, Moris. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Hamim, S. (2019). *Organisasi Birokrasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Ambarwati, A. (2018). *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Terry, Rue. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Akbar. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulkifli., Awang, Azam., dkk, 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Public (Edisi Revisi)* Alfabeta, Bandung.

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan7Publishing.

Rizqi Lazwardi M. (2021). Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pda Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Jurnal Repository*, Vol 3, No. 5 Hlm 192.

Raudha, Fitri (2022) Pelaksanaan Pengawasan Tempat Prkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Jurnal Repository*, Vol 6, No. 2 Hlm 236.

Sun Prayoga, V. (2019) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 4 Hlm 268.

Putu Gede, P. I. (2021) Eektivitas penertiban Parkir Liar Di Kawasan Obyek wisata Ubud, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No. 1 Hlmn 207-212.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN

PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

#### **Regulasi:**

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 18 ayat (1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perwako.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Walikota Pekanbaru No.284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.